



**STASIUN PSDKP  
PONTIANAK**

# **LAPORAN KINERJA**

## **TRIWULAN I**

## **TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Triwulan I Tahun 2024 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum maksimal dalam memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2024 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak.

LKj Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan I Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Stasiun PSDKP Pontianak dalam kurun waktu tahun 2021. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kedepan.

Kami berharap, Laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Stasiun PSDKP Pontianak dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dapat terus ditingkatkan.

Pontianak, 29 April 2024

Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,



**Abdul Quddus, S.St.Pi, M.Pi.**

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan I Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja serta telah diintegrasikan dengan Balanced Scorecard (BSC). Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Stasiun PSDKP Pontianak kepada Direktur Jenderal PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Pontianak telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Dalam perspektif BSC Stasiun PSDKP Pontianak telah menetapkan 8 Sasaran Strategis (SK), yaitu: <sup>(1)</sup> Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif; <sup>(2)</sup> Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif; <sup>(3)</sup> Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; <sup>(4)</sup> Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan; <sup>(5)</sup> Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan; <sup>(6)</sup> Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas; <sup>(7)</sup> Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas; <sup>(8)</sup> Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP. Pada Triwulan I tahun 2024 berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PSDKP Pontianak yang terdiri dari IKU dan IKM sebesar 104,77%. Upaya perbaikan kedepannya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan nilai komponen indeks Indeks kinerja operasi speedboat dimana ada 2 dari 5 armada speedboat pengawas yang masih belum melaksanakan gelar operasi. Sehingga untuk periode berikutnya ditingkatkan hari operasi dan objek pemeriksaan sebagai komponen perhitungan indeks kinerja Speedboat pengawas kelautan dan perikanan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak.....	2
1.4 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Pontianak .....	3
1.5 Sistematika Penyajian .....	8
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA .....	11
2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024 .....	11
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.....	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	13
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	17
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA .....	188
3.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP TW I Tahun 2024.....	188
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	22
1. IKU 1 Indek Kinerja Operasi Kapal Pengawas.....	22
2. IKU 2 Indek Kinerja Speedboat Pengawas .....	22
3. IKU 3 Persentase Pemenuhan Logistik Armada PEngawasan SDKP .....	27
4. IKU 4 Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.....	27
5. IKU 5 Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.....	38
6. IKU 6 Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan .....	42
7. IKU 7 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan .....	45
8. IKU 8 Indek Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan .....	47

9. IKU 9 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kejiata. Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasin PSDKP Pontianak .....	49
10. IK 10 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan .....	51
11. IK 11 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) .....	52
12. IK 12 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks) .....	54
3.3. Perbandingan Capaian kinerja dengan UPT sejenis .....	57
3.4. Akuntabilitas Keuangan .....	60
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>62</b>
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Rekomendasi.....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Manusia .....	4
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023.....	15
Tabel 3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....	19
Tabel 4. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	23
Tabel 5. Perbandingan Target dan Capaian Indeks operasi kapal pengawas ....	24
Tabel 6. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan I Tahun 2024.....	26
Tabel 7. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	27
Tabel 8. . Perhitungan Persentase Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan I Tahun 2024.....	28
Tabel 9. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun SDKP Pontianak.....	29
Tabel 10. Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan/atau Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.....	31
Tabel 11. Perbandingan jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	31
Tabel 12. Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi.....	32
Tabel 13. Pengawasan Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang Diperiksa Kepatuhannya dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya (Pencemaran) .....	33
Tabel 14. Pelaku usaha yang diawasi kegiatan destructive fishing .....	35
Tabel 15. Rekapitulasi Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhannya.....	36
Tabel 16. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	37
Tabel 17. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan/atau pemanfaatan sumber daya perikanan .....	39

Tabel 18. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	41
Tabel 19. Rekapitulasi Penyelesaian Pengenaan sanksi administratif Stasiun PSDKP Pontianak.....	44
Tabel 20. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengenaan sanksi administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak .....	45
Tabel 21. Pemeriksaan Hasil Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	46
Tabel 22. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	47
Tabel 23. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	48
Tabel. 24. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis MR Staisun PSDKP Pontianak .....	50
Tabel 25. Perbandingan Target dan Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis MR Staisun PSDKP Pontianak .....	50
Tabel 26. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan.....	51
Tabel 27. Perbandingan Target dan Capaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan.....	52
Tabel 28. Perbandingan Target dan Capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	54
Tabel. 29. Perbandingan Target dan Capaian Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	57
Tabel 30. Rincian Realisasi Anggaran .....	61
Tabel 31. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut TW I Tahun 2024.....	62

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak .....	3
Gambar 2. Wilayah Kerja .....	7
Gambar 3. Peta Strategi .....	14
Gambar 4. Dashboard Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak TW I Tahun 2024..	188
Gambar 5. Hasil Kegiatan Pengawasan SDP TW I 2024.....	56
Gambar 6. Capaian MP Terstandar .....	53
Gambar 7. Capaian IKM Pelayanan Publik.....	56



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Perjanjian Kinerja tahun 2024 .....	63

### **1.1 Latar Belakang**

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : Permen KP Nomor 69 Tahun 2020 Tentang OTK UPT PSDKP di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fungsi sebagai berikut: <sup>(1)</sup> Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; <sup>(2)</sup> Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; <sup>(3)</sup> Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan; <sup>(4)</sup> Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; <sup>(5)</sup> Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan; <sup>(6)</sup> Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas; serta <sup>(7)</sup> Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Peningkatan peran pengawasan terus dilakukan, salah satunya diwujudkan dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja pengawasan SDKP dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus kegiatan Stasiun PSDKP Pontianak untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (sebagai eselon 1 yang menaungi) dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

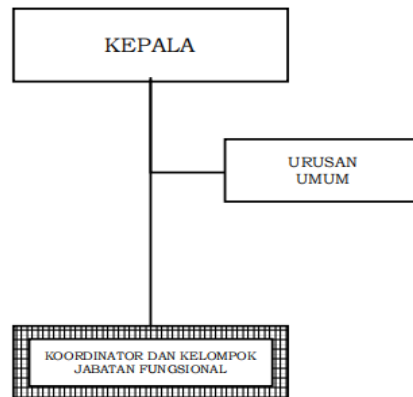
## 1.3 Isu Aktual Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak

- Mendukung Program Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan rincian program:
  - Perluasan kawasan konservasi laut
  - Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
  - Pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan
  - Pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan
  - Penanganan sampah plastik di laut.
- Maraknya pencurian ikan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) dengan berbagai modus operandi yang digunakan
- Penanganan awak kapal (tersangka) dan barang bukti kapal yang dititipkan oleh pihak kejaksaan khususnya perkara dalam proses banding/kasasi
- Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII)
- Pemanfaatan Jenis ikan yang dilindungi dan/ atau apendiks CITES yang tidak patuh dengan peraturan yang berlaku
- Perusakan terumbu karang akibat penambangan dan akibat penggunaan alat tangkap yang dilarang

#### 1.4 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Pontianak

Kedudukan UPT. Stasiun PSDKP Pontianak dipimpin oleh Seorang Kepala setingkat Eselon IVa yang berada dibawah dan bertanggung Jawab Kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan.

STRUKTUR ORGANISASI  
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan SDKP;
2. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan ;
3. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan SDKP;
5. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
6. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

#### SDM Pengawasan

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2023 total adalah 97 orang yang tersebar di UPT Satwas/Wilker dan Kapal Pengawas. Dari total 97 orang Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) tersebut, 75 orang adalah Pengawas Perikanan sebagaimana telah ditetapkan

melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEP-DJPSPDKP/2023 tentang Penetapan Pengawas Perikanan Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia

No	Unit Kerja	Jumlah SDM											Jumlah
		ST	ST+PP	FU	FU+PP	FU+PO	FPP	FPP+PO	FPP+PP	FPP+PO+PP	JFT	P3K	
1	UPT Stasiun PSDKP Pontianak		1	8	1		4	1	3	2	2	11	33
2	Satwas PSDKP Sambas			1			1	2	1			2	7
3	Satwas PSDKP Kayong Utara			4						1			5
4	Satwas PSDKP Kota Waringin Barat			2					1				3
5	Wilker PSDKP Sungai Rengas			2		1	1					1	5
6	Wilker PSDKP Sungai Kakap												0
7	Wilker PSDKP Mempawah			1									1
8	Wilker PSDKP Entikong					1							1
9	Wilker PSDKP Badau			1						1			2
10	Wilker PSDKP Singkawang							1	1				2
11	Wilker PSDKP Sajingan			1									1
12	Wilker PSDKP Jagoi Babang			2									2
13	Wilker PSDKP Ketapang			3			1						4
14	Wilker PSDKP Seruyan			2									2
15	KP. Hiu Macan 01			14	1							1	16
16	KP. Hiu 11			9	1							3	13
<b>Jumlah Total</b>												<b>97</b>	

Keterangan :

ST = Struktural

PP = PPNS

FU = Fungsional Umum

PO = Polsus PWP3K

FPP = Fungsional Pengawas Perikanan

P3K = Pegawai Dinas

## Bangunan Pengawasan

Sarana dan prasarana yang terdapat di Wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak antara lain:

### a. Gedung Kantor Pengawasan

Gedung kantor pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang sudah menjadi aset sendiri (terdaftar dalam BMN) antara lain:

1. Kantor Stasiun PSDKP Pontianak (600 M<sup>2</sup>)
2. Kantor Satwas PSDKP Sambas
3. Kantor Satwas PSDKP Kayong Utara
4. Kantor Satwas PSDKP Kotawaringin Barat
5. Kantor Wilker PSDKP Entikong
6. Kantor Wilker PSDKP Ketapang

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sampai Tahun 2024 terdapat beberapa Satwas/Wilker yang masih belum dibangun sehingga pihak Stasiun PSDKP Pontianak berkoordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten setempat yang terkait dengan Perikanan dan Kelautan untuk pinjam pakai kantor gedung atau ruangan yang digunakan sebagai kantor pengawasan, Satwas/Wilker PSDKP yang dimaksud adalah Wilker PSDKP Sungai Kakap, Wilker PSDKP Sungai Rengas, Wilker PSDKP Mempawah, Wilker PSDKP Singkawang, Wilker PSDKP Jagoi Babang, dan Wilker PSDKP Seruyan. Sedangkan kantor Wilker PSDKP Sajingan dan Wilker PSDKP Badau, statusnya sampai dengan saat ini adalah menyewa rumah milik masyarakat setempat yang difungsikan sebagai kantor pengawasan.

### b. *Detention Centre* (DTC)

Detention Center terdapat di Stasiun PSDKP Pontianak digunakan sebagai tempat penampungan sementara awak kapal penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan dengan kapasitas maksimal 160 orang.

### c. Dermaga

Dermaga berada di Stasiun PSDKP Pontianak dengan panjang ±100M dan lebar 4M yang digunakan untuk sandar Kapal Pengawas dan digunakan untuk pemeriksaan kapal yang baru diadhock.

### d. Gedung Penyimpanan Barang Bukti

Gedung Penyimpanan Barang Bukti terdapat di Pontianak yang digunakan untuk penyimpanan barang bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan berukuran 40 M<sup>2</sup>

e. Mess Operator

Difungsikan untuk tempat tinggal para Pegawai Negeri Sipil yang standby dan selalu siap siaga di Stasiun PSDKP Pontianak dengan jumlah 8 unit

f. Mess AKP

Difungsikan untuk tempat istirahat bagi Awak Kapal Pengawas dengan jumlah 15 kamar dimana setiap kamar maksimal dihuni oleh 4 orang

g. Kolam Labuh

Difungsikan sebagai tempat labuh kapal kapal hasil pengananan TPP dengan luasan 4.800 M<sup>2</sup>

### Kapal Pengawas

Stasiun PSDKP Pontianak sampai saat ini mengelola 2 unit Kapal Pengawas yaitu KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu 11 dan 5 unit Speed Boat Pengawasan yang penempatannya dialokasikan pada Stasiun PSDKP Pontianak (2 unit), Satwas PSDKP Kayong Utara (1 unit), Wilker PSDKP Kapuas Hulu (1 unit), dan Satwas PSDKP Sambas (1 unit).

### Satwas dan Wilker Pengawasan

Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Pontianak tersebar di 2 provinsi yaitu Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, adapun peta wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dapat dilihat pada Gambar 2. berikut ini:



Gambar 2. Wilayah Kerja



Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Stasiun PSDKP Pontianak adalah WPP 711 dan 712, merupakan daerah *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Seiring dengan terjadinya pengembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan per Tanggal 28 Desember 2020 maka wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak berubah menjadi 3 Satwas dan 10 Wilker Pengawasan, yaitu:

- Satwas PSDKP Sambas;
- Satwas PSDKP Kayong Utara;
- Satwas PSDKP Kotawaringin Barat;
- Wilker PSDKP Sungai Rengas;
- Wilker PSDKP Sungai Kakap;
- Wilker PSDKP Mempawah;
- Wilker PSDKP Entikong;
- Wilker PSDKP Kapuas Hulu;
- Wilker PSDKP Singkawang;
- Wilker PSDKP Sajingan;
- Wilker PSDKP Jagoi Babang;
- Wilker PSDKP Ketapang
- Wilker PSDKP Seruyan.

### **1.5 Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2024. Capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan capaian. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak (sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun berjalan.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **B. Evaluasi dan Analisis**

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### **C. Akuntabilitas Keuangan**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari : Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024.

### **2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024**

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2020-2024. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu logical model yang utamanya gunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang utamanya digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja. Pada pendekatan logical model, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (impact), sasaran program (unit eselon I) yang menghasilkan (Outcome), dan sasaran kegiatan (unit eselon II) yang menghasilkan keluaran (output). Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP

Tahun 2020-2024 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu :

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif

## **2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PSDKP Pontianak disusun berdasarkan turunan tahunan dari Rencana Strategis Tahun 2020–2024. Penetapan Kinerja (Tapja) Tahun 2024 adalah manifestasi dari Rencana Kerja Tahunan untuk mengukur target dan capaian kinerja. RKT Stasiun Pengawasan PSDKP Pontianak berisikan program kegiatan:

### **A. Pemantauan dan Operasional Armada;**

1. Operasional Kapal Pengawas
2. Kapal Perikanan yang Diperiksa Kapal Pengawas
3. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Kapal Pengawas
4. Awak Kapal yang Memperoleh Kesehatan Rutin Tahunan
5. Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan Yang Siap Operasi
6. Kesiapan Sistem Pemantauan SDKP
7. Operasional Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
8. Kapal Perikanan yang Diperiksa Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
9. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
10. Tindak Lanjut Informasi POKMASWAS
11. Bangunan/ Pos Pengawasan yang dibangun
12. Speed Boat Pengawasan yang dibangun

### **B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;**

1. Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP
2. Penyelesaian Penanganan Barbuk
3. Penyelesaian Penanganan Awak Kapal

### **C. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;**

1. Jenis Ikan Yang Dilindungi Yang Diawasi Sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku

2. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
  3. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
  4. Pelaku Usaha Perikanan Yang Bebas dari Destructive Fishing
- D. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
1. Kapal Perikanan Yang Laik Operasional
  2. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang – undangan
  3. Unit Usaha Budidaya Ikan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
  4. Usaha Distribusi Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
- E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,
1. Layanan Sarana Dan Prasarana Internal
  2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
  3. Layanan Perkantoran

### **2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk: <sup>(1)</sup> Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; <sup>(2)</sup> Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan <sup>(3)</sup> Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Pontianak yang optimal.

Stasiun PSDKP Pontianak telah menerima Perjanjian Kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen. PSDKP, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi kedalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Pontianak menggunakan 3 perspektif dalam BSC, yaitu: *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Digunakannya seluruh *perspective* dalam BSC menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP merupakan unit kerja utama dalam BSC (*Core Unit of Balance Scorecard*), bukan sebagai unit kerja pendukung dalam BSC (*supporting unit of Balance Scorecard*). *Stakeholders Perspective* dan *Customer Perspective* dijadikan satu perspektif dengan pertimbangan untuk lebih menonjolkan peran Stasiun PSDKP Pontianak dalam mendukung tercapainya kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan.



Gambar 3. Peta Strategi

Peta strategi Stasiun PSDKP Pontianak menerapkan 3 perspektif, yaitu: *customers perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Customers perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan *customer*. Sedangkan *Learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan

perbaikan dan perubahan. Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama *Balanced Score Card* (IKU BSC). Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	75
		13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	70
		15	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)	82
		16	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	84
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		18	Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	21
		19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak (inovasi)	1
		20	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)	80
		21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang	94

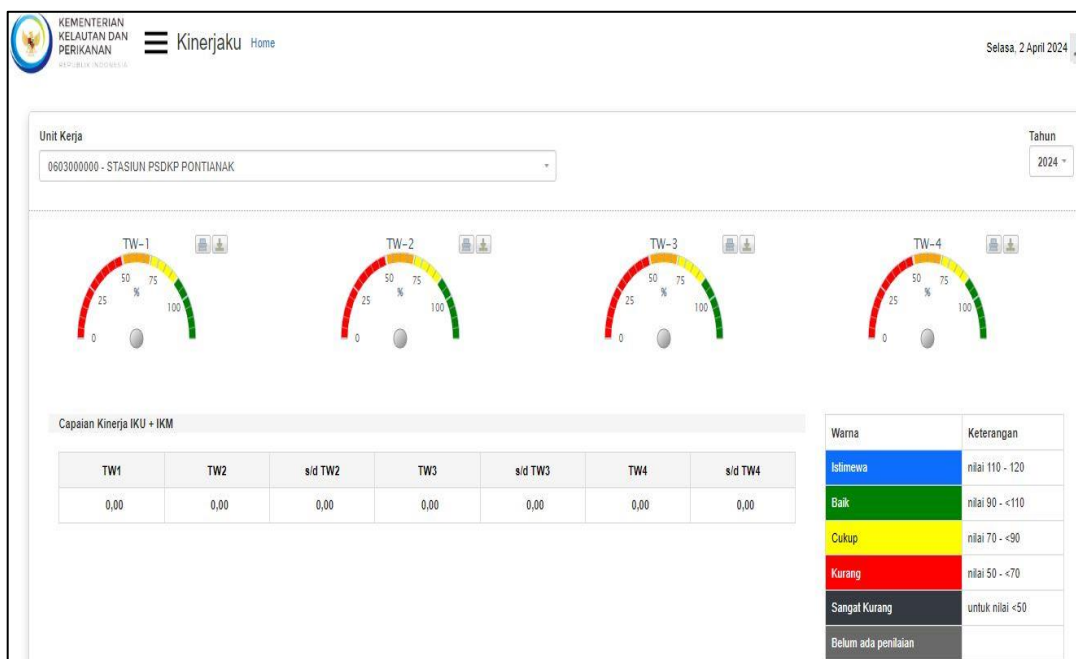
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	
		22 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80
		23 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80
		24 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	93,76
		25 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	82

#### 2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 yang didukung dengan implementasi aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi khusus BSC berbasis informasi teknologi.

### 3.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Stasiun PSDKP Pontianak telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (Delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 25 Indikator Kinerja. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PSDKP Pontianak yang terdiri dari IKU dan IKM sebesar 104,77%.



Sumber: SAPK ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id))

Gambar 4. Dashboard Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan I Tahun 2024

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh hasil pengukuran IKU pada setiap Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024	TARGET TW I	REALISASI	%
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81	-	-	-
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91	91	94,17	103,48
		3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91	91	84	92,30
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	-	-	-
		6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	-	-	-
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100	100	100	-
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100	100	100	-
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80	40	80	120
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80	40	80	120
SK7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93	40	40	100
SK8	Tata kelola pemerintahan yang	12	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit	75	-	-	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	TARGET TW I	REALISASI	%
baik lingkup Ditjen PSDKP	Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)				
	13 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100	100	100	100
	14 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	70	-	-	-
	15 Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)	82	-	-	-
	16 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	84	-	-	-
	17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	80	80	100
	18 Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	21	-	-	-
	19 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak (inovasi)	1	-	-	
	20 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)	80	80	92,93	116,16

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	TARGET TW I	REALISASI	%
	21 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	94	94	126,67	120
	22 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80	-	-	-
	23 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80	-	-	-
	24 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	93,76	-	-	-
	25 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	82	-	-	-

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Istimewa (nilai 110-120)
2		Baik ( nilai 90-<110)
3		Cukup (nilai 70 - <90)
4		Kurang (nilai 50 - <70)
5		Sangat Kurang (nilai < 50)
6		Belum Ada Penilaian

Penjelasan tentang capaian IKU pada masing-masing Sasaran Strategis tersebut akan dijelaskan pada bagian evaluasi dan analisis capaian kinerja.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama periode Triwulan I Tahun 2024 Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

#### 1. IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan; b. Cakupan wilayah pengawasan; c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Untuk mengukur Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left( \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

- Ikp = Indeks kinerja Kapal Pengawas
- Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
- Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas
- Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

Variabel Pembentuk:

1. Pemeriksaan : Bobot 40%
  - Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal): Bobot 70%
  - Pemeriksaan Kelautan (kali ): Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi dan lain lain.

- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 2 (dua) unit kapal ikan per hari.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;

- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).

- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%

- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%

- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%

- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%

- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi: Bobot 40%

- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai. Hasil pengukuran indeks kinerja operasi kapal pengawas Triwulan I tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 4. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan I Tahun 2024

No	Satker	Kapal Pengawas	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)			Pemeriksaan Kelautan (30%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)			Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)			Pemutusan Rumpon Ilegal (30%)			Dukungan Operasi Bersama (40%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)			Total Nilai Indeks	Nilai per Satker
			TW I			TW I			TW I			TW I			TW I			TW I			TW I			TW I			TW I			TW I							
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai		Target	Realisasi	Nilai				
1	Stasiun PSDKP Pontianak	KP. HIU MACAN 01	24	14	40.83	0	0	30	28.33	0.05	0.13	40	0	0	0	60	0	0	40	15	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0	40	5	88.33	94.17		
		KP. HIU 11	12	12	70.00	0	0	30	40	0.03	0.05	40	0	0	0	60	0	0	40	15	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0	40	5	100.00			



Capaian pada IKU indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada Triwulan I tahun 2024 sebesar 94,17 atau dengan persentase capaian sebesar 103,48%. Capaian IKU ini telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 91. Capaian IKU ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 pada periode triwulan I yaitu sebesar 99,53. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena pada tahun 2022 pengukuran pada triwulan II dan IV dan IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru pada tahun 2022. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022. Tercapainya IKU ini dikarenakan realisasi hari operasi yang telah tercapai dari target hari operasi dan jumlah objek pengawasan seperti kapal perikanan dan objek kelautan yang diperiksa telah terpenuhi, walau pada kapal pengawas Hiu Macan 01 masih terdapat kekurangan dan unsur lain yang menjadi komponen perhitungan indeks operasi kapal pengawas. Untuk mendukung IKU ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.499.976.000 dengan realisasi sampai bulan Maret 2024 sebesar Rp. 1.475.128.000 atau dengan persentase sebesar 14,04%. Keberhasilan capaian IKU ini dikarenakan kondisi kapal pengawas (Hiu Macan 01 dan Hiu 11) pada periode triwulan I tahun 2024 dengan kondisi yang siap untuk beroperasi sedangkan faktor cuaca buruk hanya terjadi pada awal tahun yaitu bulan Januari sedangkan rentang bulan Februari dan Maret sampai dapat dimaksimalkan gelar operasi. Hal ini sejalan dengan kegiatan perawatan yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2023 khususnya untuk kedua kapal pengawas. Jumlah dan kondisi kesiapan AKP (awak kapal pengawas) juga menjadi penentu keberhasilan capaian IKU ini, AKP yang ditempatkan sudah memiliki kecakapan pengawakan kapal yang cukup mumpuni yang telah mengikuti kegiatan pelatihan sepanjang tahun 2023 dan koordinasi berupa apel siaga diawal tahun 2024 serta penambahan kapasitas ABK Kapal pengawas sepanjang pada triwulan I tahun 2024 yang dilakukan baik daring maupun luring. Pada tahun 2023 lalu juga AKP Stasiun PSDKP Pontianak Juga melakukan *Medical Check-Up* untuk pemantapan kondisi kesehatan AKP selama bertugas ditahun 2024.

Tabel 5. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Operasi Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	87,6	99,53	91	94,17
% Capaian	-		-		-		114		103,48	

## 2. IKU Indeks kinerja Speed Boat Pengawas

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan yakni; 1). Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan; 2). Cakupan wilayah pengawasan; 3). Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; 4). Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi. Formula perhitungan:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left( \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

- i<sub>sp</sub>* = Indeks kinerja Speedboat Pengawas  
Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi  
Capaian = Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas  
Target = Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas:

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:

- Pemeriksaan Kapal (unit kapal): Bobot 50%
- Pemeriksaan Kelautan (kali): Bobot 50%
- Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan per hari.

2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM<sup>2</sup> (Sumber: BIG, 2015).

- Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.

3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:

- Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan: Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR: Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:

- Penyitaan Alat Tangkap Terlarang Bobot: Bobot 40%
- Pemutusan Rumpon Illegal: 40%
- Dukungan Operasi Bersama: Bobot 20%
- Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Hasil pengukuran indekskinerja operasi Speedboat pengawas Triwulan I tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 6. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan I Tahun 2024

Lokasi UPT	Nama Speedboat	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)			Pemeriksaan Kelautan (50%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)			Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)			Pemutusan Rumpon Illegal (40%)			Dukungan Operasi Bersama (20%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)			Total Nilai Indeks	Nilai per Satker
		TW I			TW I			TW I			TW I			TW I			TW I			TW I			TW I			TW I			TW I	TW I	TW I					
		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai				Target	Realisasi	Nilai		
Stasiun PSDKP Pontianak	Napoleon 03	9	17	50	0	0	50	40	0.0075	0.0075	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	100				
	Napoleon 37	5	8	50	0	0	50	40	0.0065	0.0065	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	100				
	Napoleon 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	60				
	RBI/Sea Rider 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	60				
	Speed Boat TB.01	10	10	50	0	0	50	40	0.0083	0.0083	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	100				

Capaian pada IKU indeks kinerja operasi Speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada Triwulan I tahun 2024 sebesar 84 atau dengan capaian 92,3% dengan rincian pada tabel diatas. Capaian IKU ini tidak mencapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 91. Capaian IKU ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode triwulan yang sama yaitu sebesar 100. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir

karena merupakan IKU baru pada tahun 2022 perhitungan pada Triwulan II (semesteran). IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022. Pada IKU tahun sebelumnya merupakan IKU cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan speedboat pengawas. Tidak tercapainya IKU ini dikarenakan ada 2 dari 5 armada Speedboat pengawas yang belum melakukan gelar operasi dan belum melakukan pemeriksaan objek kelautan dan/atau perikanan. Tidak beroperasinya 2 armada dikarenakan armada Napoleon 038 masih mengalami kerusakan dan dalam masa perbaikan sehingga belum dapat melakukan operasi sedangkan armada RIB belum melakukan operasi karena mempertimbangkan armada yang memprioritaskan melakukan operasi ketika adanya aduan masyarakat dan tindakan insidental. Untuk selebihnya armada yang lainnya tidak mengalami permasalahan dan kondisi Speedboat juga siap untuk melakukan gelar operasi dengan kondisi yang baik. Kegiatan perawatan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang telah dilakukan sepanjang tahun sehingga menjamin kesiapan dalam kesiapan operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat nantinya sepanjang tahun 2024. Untuk mendukung IKU ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 995.130.000 dengan realisasi sampai bulan Maret tahun 2024 sebesar Rp. 148.030.000 atau dengan persentase sebesar 14,88%.

Tabel 7. Perbandingan Target dan Capaian Indek operasi Speed Boat Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks kinerja Speed Boat Pengawas	-	-	-	-	-	-	87,6	100	91	84
% Capaian	-		-		-		114		92,3	

### 3. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel Logistik kapal terdiri dari : a. Bahan Bakar Minyak (BBM) , dan b. Pelumas, Logistik Personel terdiri dari : a. Bahan Makanan b. Air Tawar, dan c. Alat-alat Pelayanan (ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck & Mesin) d. Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api. Dalam hal terjadi kerusakan kapal yang menyebabkan tidak

dapat melaksanakan operasi pengawasan maka, target dianggap tercapai (100%).  
Formula perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$i_{dat} = \sum_{i=1}^n f_i$$

Keterangan:

$i_{dat}$  = Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP

$n$  = Jumlah indeks kinerja

$i$  = indeks Pemenuhan

$f_i$  = faktor penghitung

Daftar Faktor Penghitung Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP 1). Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%); 2). Pelumas (20%); 3). Bahan Makanan (25%); 4). Air Bersih (15%); 5). Alat-alat Pelayanan (5%); 6). Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (5%). Hasil pengukuran Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas Triwulan I tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 8. Perhitungan Persentase Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP Lingkup Stsiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan I Tahun 2024

No	Satker	Kapal Pengawas	Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%)			Pelumas (20%)			Bahan Makanan (25%)			Air Bersih (15%)			Alat-lat Pelayanan (5%)			Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (5%)			Total Nilai Indeks
			TW I			TW I			TW I			TW I			TW I						
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	
1	Stasiun PSDKP Pontianak	KP. HIU MACAN 01	3	3	30	3	3	20	3	3	25	3	3	15	1	1	5	3	3	5	100.00
		KP. HIU 11	3	3	30	3	3	20	3	3	25	3	3	15	1	1	5	3	3	5	100.00

Capaian pada IKU pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada Triwulan I tahun 2024 sebesar 100% atau dengan persentase capaian sebesar 100%. Rincian hasil komponen perhitungan dapat dilihat pada tabel diatas. Capaian IKU ini telah mencapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 karena baru ditargetkan pada triwulan IV. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru pada

tahun 2022 yang penilaian tahunan. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022.

Tercapainya IKU ini dikarenakan kebutuhan BBM setiap bulannya telah terpenuhi dimana dalam hal ini Stasiun PSDKP Pontianak telah melakukan Kerjasama dengan pihak Pertamina Patra Niaga sehingga dalam pemenuhan kebutuhan BBM selalu terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan pelumas juga menjadi perhatian dimana pelumas untuk mesin induk dan mesin bantu dapat dipenuhi secara tepat waktu. Kebutuhan bahan makanan juga selalu terpenuhi baik Ketika hendak melakukan gelar operasi maupun Kapal pengawas berlabuh di dermaga, langkah yang diambil berupa berbelanja kebutuhan makanan pada lokasi yang terjangkau dan pada penyedia bahan makanan yang lebih lengkap. Untuk kebutuhan Air Tawar tidak mengalami kendala dikarenakan wilayah Pontianak dan Kepulauan Riau dalam pemenuhan air bersih cukup mudah. pemenuhan alat-alat pelayanan telah terpenuhi saat armada Kapal Pengawas mengajukan kebutuhan logistik peratan ATK dan peralatan dukumangan komputer suplai. Pada triwulan I tahun 2024 telah dilakukan pengadaan kebutuhan perlengkapan Kapal Pengawas telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan kapal itu sendiri. Pemenuhan kebutuhan yang diperlukan juga telah ditangani secepat mungkin oleh perangkat yang menangani sarana prasarana lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Untuk mendukung IKU ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 8.254.286.000 dengan realisasi sampai bulan Maret tahun 2024 sebesar Rp 1.475.128.000 atau dengan persentase sebesar 17,87%. Adanya buka tutup blokir (*automatic adjustment*) dan ABT (Anggaran Biaya Tambahan) menjadikan postur anggaran berubah dalam pemenuhan logistik Armada Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sehingga menjadikan IKU ini berhasil dicapai. yang semula Rp. 16.088.928.000 menjadi Rp. 21.738.192.000.

Tabel 9. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
<b>% Capaian</b>	-		-		-		-		<b>100</b>	

#### 4. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan” diidentifikasi kedalam IKU yaitu: (1). Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan (2). Pemeriksaan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha kapal kelautan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil kelautan (3). Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan. Formula perhitungannya adalah sebagai berikut;

$$x_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

$X_{sdk}$  : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

$X_i$  : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i

$n$  : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Stasiun PSDKP Pontianak dalam mencapai IKU ini telah melakukan kegiatan seperti (1) Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak; (2) Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak; (3) Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya; (4) Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak/ Destructive Fishing Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

Tabel 11. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan Yang Diperiksa Kepatuhannya Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak triwulan I Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi
1	Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya	2
2	Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya	4
3	Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	13
4	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak/ Destructive Fishing	25
<b>Total Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak</b>		<b>44</b>



Pada triwulan I tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 44 pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak seperti yang telah dijelaskan pada tabel di atas. Capaian nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan stasiun PSDKP Pontianak sebesar 100 yang didapat dari pemenuhan Persiapan, meliputi : 1). Membuat jadwal pemeriksaan, berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa, menyusun administrasi pemeriksaan dan/atau rapat persiapan pemeriksaan dengan bobot 10 .2). Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha berupa Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung dengan bobot 70 dan 3). Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK dengan bobot 20. IKU ini telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100. IKU ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami capaian yang sama yaitu 100 yang merujuk pada IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU yang dimulai pada tahun 2022 revisi perjanjian Kinerja bulan September Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan triwulan I tahun 2024 adalah 100 yang terbentuk dari:

**a. Pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi**

Rekapitulasi pelaku usaha yang diawasi dari pemanfaatan jenis ikan dilindungi pada triwulan I tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 12. Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi

No	Waktu dan Pelaksana Pengawasan	Lokasi Pengawasan	Nama pelaku usaha	Jenis Ikan	Ketaatan	Keterangan
1	1. Imam Budiyo, S.St.Pi 2. Achmad Rohmadun 3. Oky Wira Negara, 4. Muhammad Akbar, 20 - 22 Februari 2024	Jalan DR. Sutomo, No 235, Desa Sungai Ayak II, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau	PD. Tirta Kapuas	Ikan Arwana	Taat	Usaha yang dilakukan oleh PD. Tirta Kapuas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	1. Bonis Andrei Tri Saputra 2. Sarjiyo, 3. Kurniawan Arida	Jalan Putussibau Bika KM. 231, Desa Jaras, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu	CV. Lucky Indo Aquatic	Arwana Super Red	Taat	Pelaku Usaha sesuai dengan perizinannya  Penjadwalan ulang untuk pengawasan rutin selanjutnya minimal 1 tahun sekali

Pada Triwulan I tahun 2024 pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi berjumlah sebanyak 2 pelaku usaha. Telah dilakukan di lokasi usaha Kabupaten Sekadau dan Kapuas Hulu. Pelaku yang telah diperiksa telah taat dan Kapuas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya.**

Perairan darat dan laut adalah ekosistem akuatik yang memiliki peran penting dalam siklus hidrologi. Selain dipengaruhi oleh aktivitas organisme atau lingkungan, kualitas suatu perairan juga ditentukan oleh aktivitas manusia. Perubahan pola pemanfaatan lahan menjadi area pemukiman, pertanian, serta meningkatnya aktivitas industri akan memberikan dampak terhadap kualitas perairan. Perairan menjadi ekosistem yang rentan tercemar akibat limbah yang dihasilkan dari beragam pola pemanfaatan lahan dan aktivitas industri. Mengingat peran penting perairan bagi keberlangsungan hidup organisme, termasuk berbagai jenis ikan, maka pemantauan perairan yang terindikasi tercemar sangat perlu dilakukan secara berkelanjutan, komprehensif, dan menggunakan metode yang tepat agar dapat segera ditangani. Stasiun PSDKP Pontianak pada pengawasan sektor kelautan untuk mendukung program prioritas KKP tahun 2024 “Penanganan Sampah Plastik di Laut, pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk mendukung program prioritas ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada triwulan I tahun 2024 pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya sebanyak 13 pelaku usaha yang telah dilakukan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebagaimana rinciannya dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 13. Pengawasan Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (Pencemaran) sampai bulan Maret 2024

No	Pelaku Usaha	Alamat	Waktu Pengawasan	Hasil Pengawasan
1	Bong Fai Tjong	Jalan Raya Sungai Bakau, Desa Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah	6 - 8 Maret 2024	Memiliki kelengkapan dokumen perizinan berusaha dan dokumen kepedulian lingkungan yang lengkap dan sesuai namun belum memiliki dokumen PKKRPL

2	Hendri	Jalan Gst. M. Taufik No.03 A, Desa TERusan, Kab. Mempawah		Pelaku usaha a.n Hendri memiliki kelengkapan dokumen perizinan berusaha dan dokumen kepedulian lingkungan yang lengkap dan sesuai (budi daya ikan air tawar)
3	PT. Multi Artha Samudra	Jalan A. Rani, GG Misno, Kab. Mempawah		Memiliki kelengkapan dokumen perizinan berusaha dan dokumen kepedulian lingkungan yang lengkap dan ssesuai namun belum memiliki dokumen PKKPR
4	T. Agri Inti Prima	Jalan A. Yani Kel. Pasir Wan Salim, Kab. Mempawah		Terindikasi melakukan pelanggaran antara lain sebagai berikut: (1) NIB tidak terdeteksi di dalam OSS dengan keterangan nihil; (2) Tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan
5	Pokdakan Maju Jaya Bersama	Jl. Cemara Indah Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara	21-23 Maret 2024	Tidak ada indikasi pencemaran dan pelanggaran
6	Abdul Sanapsud	Jl. Cemara Indah Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara		Tidak ada indikasi pencemaran dan pelanggaran
7	Pokdakan Mina Barokah	Jl. M. Ali Bahrudin RT. 005 Desa Sungai Pasir Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara		Tidak ada indikasi pencemaran dan pelanggaran
8	PT. Bina Ovivipari Semesta (BIOS)	Kampung Bunbun dan Bangkok, Kec. Batu Ampar, kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat	9 - 23 Februari 2024	Tidak ada indikasi pencemaran dan pelanggaran
9	PT. Usaha Jaya Putra Sundjoyo	Jalan Penjajab Ujung Barat No.25, Kecamatan Pemangkat, Kab. Sambas	20 - 22 Maret 2024	Terindikasi memiliki kepatuhan yang baik
10	Phang Pet Khiun	Jalan Alianyang No.26/27, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang		Phang Phet Khiu (PO.999) memiliki kepatuhan yang baik
11	Tjang Se Su,	Jalan ALianyang Komp, Pasar Ikan, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang		Tjsng Se Su memiliki kepatuhan yang baik
12	Ng Saw Djung	Jalan ALianyang Komp, Pasar Ikan, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang		NG Saw Djungh memiliki kepatuhan yang baik
13	Tjong Hoi Men	Jalan Tani No.422, Ke. Singkawang Barat, Kota Singkawang		Tjong Hoi Men (Laut Lestari) Memiliki kepatuhan yang baik

**c. Pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan destructive fishing**

Rekapitulasi pelaku usaha yang diawasi dari kegiatan destructive fishing sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Pelaku usaha yang diawasi kegiatan *destructive fishing*

NO	Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pemeriksaan
1	SUPIANSYAH	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
2	ABDUL RAHMAN	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
3	SAID M. YUSUF	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
4	NURKHOLIS	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
5	MUSYADI YUSUF	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
6	CECEP WISHNU. K	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
7	MUHLI	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
8	M. YUSUF MASTUR	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
9	ABDUL HAKIM	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
10	CECEP WISHNU. K	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
11	Andrianus	Perairan Kecamatan Bika Kab. Kapuas Hulu	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
12	Uju Suden	Perairan Desa Ujung Bayur Kab. Kapuas Hulu	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
13	David Roy	Perairan Kecamatan Embaloh Hilir Kab. Kapuas Hulu	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
14	Ibrahim	Perairan Kecamatan Embaloh Hilir Kab. Kapuas Hulu	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
15	Sion Anwar	Perairan Kecamatan Embaloh Hilir Kab. Kapuas Hulu	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
16	MASTUAN	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
17	NORDIN	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
18	JUNAID	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
19	MUSYADI YUSUF	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
20	MUHL	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
21	Joni Carlos	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
22	Ilhamsyah	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
23	Jacuk	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
24	Ibay	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
25	Roby	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak

Sampai dengan 31 Maret 2024 pengawasan *destructive fishing* telah dilakukan sebanyak 25 pelaku usaha terhadap nelayan dengan kapal <10 GT. Dari 25 kapal tersebut 15 kapal dilakukan di PPI Kumai oleh Satwas PSDKP Kota Waringin Barat dan 10 perahu kapal di Wilker Kapuas Hulu. Dari hasil pemeriksaan 25 kapal yang diperiksa tidak ditemukan indikasi melakukan kegiatan *destructive fishing* dan tidak adanya dugaan pelanggaran.

#### **d. Pemeriksaan kepatuhan usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut**

Pada Triwulan I tahun 2024 Pemeriksaan kepatuhan usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut sebanyak 4 pelaku usaha. Dimana pelaku usaha tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut;

Tabel 15. Rekapitulasi Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhan nya Triwulan I tahun 2024

No	Pelaku Usaha	Alamat	Waktu Pengawasan	Hasil Pengawasan
1	PT. Citra mandiri Manajemen	Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat	12-13 Februari 2024	Tidak ada indikasi pelanggaran perizinan KKPRL
2	CV. Borneo Mutiara	Kepulauan Lemukutan, Kabupaten Bengkayang	21 - 23 Februari 2024	Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang laut belum dapat terpenuhi karena belum memiliki dokumen perizinan PPKPRL namun terindikasi patuh karena telah mengajukan permohonan pembuatan PPKPRL melalui surat permohonan izin PPKPRL no 01/BM/III/2023 kepada Direktur Jenderal PKRL
3	T. Bima Budidaya Mutiara	Kepulauan Lemukutan, Kabupaten Bengkayang	21 - 23 Februari 2024	Tidak ada indikasi pelanggaran perizinan KKPRL
4	Hendra	Kepulauan Karimata	22 - 26 Maret 2024	Tidak adanya indikasi pelanggaran dan tidak adanya dampak dari pelanggaran

Pelaku usaha yang telah diperiksa berjumlah 4 pelaku usaha sampai bulan Maret 2024. Pelaku usaha yang berjumlah 4 ini telah memiliki dokumen perizinan peruntukan kegiatan usaha. Dari beberapa pelaku usaha atau badan usaha yang telah dilakukan oleh tim PSDKP Pontianak didapat ada yang belum mempunyai dokumen KKPRL dan sedang dalam pengajuan perizinan. Bagaimanapun juga KKPRL merupakan bentuk implementasi langsung dari Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut serta

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Lebih lanjut KKPRL merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko “sehingga untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, para pelaku usaha didorong untuk wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko. Pemanfaatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan atau badan usaha yang dikunjungi sudah sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038. Pendampingan ini dilakukan untuk mendorong para pelaku usaha atau badan usaha untuk segera melengkapi dokumen perizinan KKPRL.

Tabel 16. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
% Capaian	-		-		100		100		100	

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 648.000.000 dan sampai dengan 31 Maret 2023 telah terealisasi sebesar Rp 106.893.999 atau sebesar 16,50%. Selain dukungan anggaran keberhasilan dalam pencapaian IKU ini dikarenakan pemeriksaan jumlah pelaku usaha dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena lokasi pengawasan yang berdekatan. Tercapainya target yang ditentukan tidak terlepas dari SDM pengawas perikanan dan Pows PWP3K yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di tiap Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Keberhasilan pencapaian target baik dikarenakan pada awal akhir tahun 2023 sebagai pemantapan kegiatan tahun 2024 telah dilakukan pertemuan koordinasi Satwat/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebagai sinkronisasi dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan. Kemudian setelah 3 bulan dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan pengawasan dengan media daring lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dikoordinir oleh Tim kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan Stasiun PSDKP

Pontianak. Kemudian juga selalu koordinasi dengan Direktorat PPSDK sebagai sinkronisasi kegiatan pengawasan. Adanya komunikasi lewat whatapps yang tergabung dalam group pengawasan SDKP menjadikan kegiatan lebih efektif dan efisien. Jadi Sasaran Strategis dan Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah mencapai target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil ini merupakan suatu bentuk dukungan program ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah di gagas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

#### **5. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan” 1). Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan 2). Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan. 3). Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan. Untuk formula perhitungan capaian adalah;

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- X<sub>sdp</sub>* : Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
- X<sub>i</sub>* : Nilai pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i
- n* : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

Untuk penentuan nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 17. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pada triwulan I tahun 2024 capaian nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak sebesar 100 atau persentase capaian sebesar 100% yang didapat dari pemenuhan Persiapan, meliputi : 1). Membuat jadwal pemeriksaan, berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa, menyusun administrasi pemeriksaan dan/atau rapat persiapan pemeriksaan dengan bobot 10 .2). Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha berupa Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung dengan bobot 70 dan 3). Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP dengan bobot 20. IKU ini telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100. IKU ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami capaian yang sama yaitu 100 dan mencapai nilai yang sama pada TW I tahun 2022 yang merujuk pada IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU yang dimulai pada tahun 2022 revisi perjanjian Kinerja bulan September Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan sampai tahun 2023 adalah 100 yang terbentuk dari hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan subsektor pengolahan dan pemasaran ikan, Subsektor



Pembudidayaan ikan dan Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan ikan dimana sampai dengan 31 Maret 2024 telah dilakukan pengawasan sebanyak 117 lembaga. Rekapitulasi kegiatan pengawasan Sektor Sumber daya Perikanan dapat dijelaskan pada garfik berikut;



Gambar 5. Hasil Kegiatan Pengawasan Sektor Sumber Daya Perikanan TW I Tahun 2024

Melihat grafik diatas dapat dijelaskan bahwa pengawasan terbanyak pada subsektor Pengolahan dan pemasaran ikan. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan terkesan besar padahal pada praktiknya pada satu kampung perikanan budidaya di Mempawah dapat diperoleh data pengawasan yang banyak dikarenakan basis data Pemilik perorangan bukan kelompok dan untuk mendukung program prioritas KKP tahun 2024 pada program “Pembangunan Perikanan Budidaya Ramah Lingkungan”, pengaswas perikanan Stasiun PSDKP Pontianak dalam melaksanakan pengawasan budidaya juga melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada nelayan terkait budidaya ramah lingkungan dengan penggunaan obat ikan yang sesuai aturan dan cara mitigasi pencemaran budidaya.

Untuk mencapai sasaran kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 656.600.000 dan sampai dengan 31 Maret 2024 telah mencapai realisasi sebesar Rp 83.937.618 atau dengan realisasi 12,78%. Capaian IKU ini telah tercapai dikarenakan pemeriksaan jumlah pelaku usaha dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena lokasi pengawasan yang berdekatan seperti

pengawasan usaha budidaya ikan pada suatu kampung budidaya ikan di Mempawah, distribusi perikanan, unit pengolahan ikan. Pengawasan kapal perikanan karena pengawasan terpusat pada pelabuhan perikanan juga tingginya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus dokumen dalam usaha penangkapan ikan. Tercapainya target dan efektifitas kegiatan tidak terlepas dari SDM pengawas perikanan yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di tiap Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Selain hari kerja pengawas perikanan setiap hari Sabtu dan Minggu dilakukan piket pelayanan pada lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Selain itu keberhasilan pencapaian target dan efisiensi yang baik dikarenakan pada akhir tahun 2023 sebagai langkah pementapan kegiatan pada tahun 2024 dilakukan pertemuan koordinasi Satwat/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dilaksanakan di Singkawang. Langkah ini merupakan upaya dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan membahas perihal kegiatan teknis khususnya kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan. Kemudian setelah 3 bulan dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan pengawasan dengan media daring lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dikoordinir oleh ketua Tim Kerja intelijen dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak. Selain itu juga dibuat group kegiatan dan pelaporan pengawasan sektor perikanan via whatapps untuk memudahkan komunikasi antar Stasiun PSDKP, Satwas dan Wilker Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak terkait pencapaian pengawasan sumber daya perikanan. Dengan ini dapat dikatakan indikator kinerja ini telah berhasil pada Triwulan I Tahun 2024 dikarenakan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 18. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	100	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100
% Capaian	25		-		100		100		100	

## 6. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:

- a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.
- c) Dit. PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/ pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.
- d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut :

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang kelautan dan perikanan

$$x = \left( \frac{a}{b} \right) \times 100\%$$

- x** : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP  
**a** : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama  
**b** : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

**Dengan Kriteria Indeks:**

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	70	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTASE PERKEMBANGAN KEMAJUAN (%)	DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ekspose	60	1. Undangan Ekspose 2. Hasil Ekspose
2	Penetapan Sanksi Administratif	40	Dokumen Penetapan Sanksi berupa Teguran (Surat Peringatan)/ Paksaan Pemerintah/ Denda Administratif
<b>Jumlah</b>		100	

- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. PP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin a, poin b, dan poin c.
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin d dan poin e.
- Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

Sampai dengan 31 Maret 2024 Stasiun PSDKP Pontianak telah melakukan kegiatan pengenaan sanksi administratif sebanyak 1 perkara dan sudah selesai perkara 1 perkara yang berarti bahwa capaian sebesar 100%. Nilai 100% kalau dikonversi pada indeks berada pada nilai indeks 80. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 40. target yang ditetapkan sebesar 80 atau persentase capaian sebesar 200%. IKU ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama mencapai nilai yang lebih besar yaitu sebesar 60 dengan merujuk pada indikator kinerja Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup

Stasiun PSDKP Pontianak dan IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 Tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022 target akhir tahun atau Triwulan IV. Adapun pencapaian pengenaan saksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dijelaskan pada tabel berikut,

Tabel 19. Rekapitulasi Penyelesaian Pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

NO	UNIT USAHA	JENIS PELANGGARAN	Lokasi	Keterangan
1	KM. Herry	Melakukan operasi penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan jenis Jaring Insang Hanyut di Perairan Laut Kalimantan Barat yang tidak dilengkapi dengan SPB , melakukan aktifitas penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan ikan dan melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan pelabuhan pangkalan sesuai dengan dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang dimiliki	Perairan Pulau Lemukutan	Denda Rp. 32.175.000

Keberhasilan IKU ini dikarenakan tidak terlepas dari kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala atau terjadwal seperti pengawasan menggunakan sarana speed boat pengawasan sebanyak 5 unit yang tersebar di Satwas/Wilker dan pengawasan rutin kepada pelaku usaha seperti unit pengolahan ikan, distribusi dan pemasaran serta unit budidaya perikanan. Adanya Kerjasama pengawasan di lapangan sesama petugas lintas instansi sehingga memberikan hasil pengawasan yang lebih efektif. Selain itu penyelesai kasus terkait pengenaan sanksi administratif oleh pengawas perikanan sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penanganan perkara sesuai dengan waktu yang diinginkan. Koordinasi yang terjalin dengan direktorat penanganan pelanggaran bidang KP juga cukup membantu dan mendukung dalam pencapaian IKU ini. Dukungan anggaran juga memberikan kontribusi yang signifikan. Untuk tahun 2024 telah dianggarkan sebesar Rp. 313.000.000 sampai dengan bulan Maret telah realisasi sebesar Rp. 61.170.461 atau sebesar 19,54%. Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil karena sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 20. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	40	60	40	80
<b>% Capaian</b>	-		-		-		120		200	

## 7. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana pelaku usaha berdomisili; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik. Formula perhitungan dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

$$X_{TLP} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_n)}{n} \times 100\%$$

- $X_{TLP}$  : Indeks Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha KP  
 $X_n$  : Jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa  
 $n$  : Jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan

### Dengan Kriteria Indeks:

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	70	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2023 telah menangani kegiatan hasil analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 16 perkara diantaranya adalah dugaan pelanggaran jalur daerah penangkapan ikan <12 Nautical mile, kepada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran tersebut telah dilakukan pemanggilan dan dimintai keterangan dan dari hasil tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Dari 16 perkara yang ditangani oleh Stasiun PSDKP Pontianak, 16 kasus perkara sudah sudah terselesaikan dan sudah terbit Berita Acara, sehingga didapat nilai realisasi sebesar 100% dan dari nilai 100% tersebut apabila dikonversi pada nilai indeks mencapai indeks 80. Capaian ini telah melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 40. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 lalu pada periode yang sama dikarenakan merupakan IKU baru ditahun 2023 pada perhitungan triwulan IV. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2023. Rekapitulasi kegiatan hasil analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 21. Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lingkup stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024

NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)							ANALISIS LANJUT		TINDAK LANJUT					CAPAIAN IKU			
		TRANSSHIPMENT	PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	IZIN HABIS			JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	PROSES BAP / SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	SP1	SP2	DENDA	PIDANA	%	Kriteria indeks
						<30 hari	>30 hari	Total											
1	PONTIANAK	-	-	-	16	-	-	-	16	-	16	-	16	-	-	-	-	100.00%	80
	TOTAL				16				16		16								

Keberhasilan IKU ini dikarenakan tidak terlepas dari kegiatan penindakan atau tindak lanjut yang berupa pemanggilan dan pemeriksaan kepada pelaku usaha yang yang terduga melanggar sistem pemantauan kapal perikanan di WPPNRI 711 dan 712 dan kegiatan dilakukan pada Satwas yang terdekat terduga melakukan pelanggaran. Adanya informasi dan distribusi data dari sistem pemantaun kapal perikanan direktorat POA yang secara cepat distribusinya ke UPT Stasiun PSDKP Pontianak sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Keberadaan pengawas perikanan dan PPNS perikanan yang tersebar di Satwas dan Wilker Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak menjadikan kegiatan tindak lanjut dapat dilaksanakan dengan baik dan telah dilakukan pelaksanaan monitoring oleh Direktorat PP dan Direktorat PPSDP serta Direktorat PPSDK.

Tabel 22. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	-	-	40	80
<b>% Capaian</b>	-		-		-		-		120	

## 8. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan } X_a = \left( \frac{a}{\sum b} \right)$$

$x_a$  = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

$a$  = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) (SP-3)

$\sum b$  = Total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan

Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan. - Apabila terdapat kasus yang di biayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja di klaim sebagai capaian unit kerja yang membiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan.



Pencapaian nilai penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak diukur dengan membandingkan jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3) atau sudah mempunyai putusan dengan jumlah kasus yang ditangani 3 perkara yang sudah ingkrah dibagi dengan total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan. Dikarenakan pada periode triwulan I tahun 2024 belum terdapat kasus yang ditangani, maka capaian sesuai target pada periode triwulan I yaitu sebesar 40 atau persentase capaian sebesar 100%.

Capaian pada IKU “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak” apabila dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2023 pada periode yang sama dengan merujuk pada IKU “Persentase Penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)” dengan capaian yang sama yaitu pada triwulan I tahun 2023 sebesar 40%. IKU ini merupakan IKU yang ada di 2023 revisi perjanjian Kinerja September 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian IKU 5 tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022.

Capaian yang telah dicapai Stasiun PSDKP Pontianak dikarenakan tidak lain merupakan bentuk dari hubungan yang baik antara Stasiun PSDKP Pontianak dengan penegakan hukum terkait seperti Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Negeri Pontianak dan *stakeholder* lainnya seperti Saksi Ahli, Juru Bahasa dan lainnya yang telah dirintis sebelumnya. Adapun Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024 mendapat pagu sebesar Rp. 476.000.000 untuk penyidikan sampai dengan 31 Maret 2023 realisasi anggaran sebesar Rp 0 atau sebesar 0%.

Tabel 23. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	40	40	40	40
<b>% Capaian</b>	-		-		-		<b>100</b>		<b>100</b>	

## 9. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula perhitungan adalah sebagai berikut;

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

- X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko
- a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi
- b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Perhitungan capaian Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sampai dengan 31

Maret tahun 2023 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% mencapai dari target yang ditetapkan pada Triwulan I tahun 2024 yaitu sebesar 100%. IKU ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 pada periode yang sama, mengalami pencapaian yang sama yaitu 100%. Indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2023. Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak telah Menyusun Laporan SPIP MR baik di triwulan I tahun 2024 ini dan telah dilaporkan secara berjenjang dan tepat waktu. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko ditiap bidang juga telah dilakukan antara lain Manajen Resiko bagian Tata Usaha, Manajen resiko bagian sarana dan Prasarana dan manajemen resiko tata usaha. Selain itu pegawai ditiap-tiap bidang telah mengikuti workshop dalam penyusunan dokumen manajemen resiko dan telah mengikuti kegiatan asistensi rutin yang dilaksanakan Setditjen PSDKP. Dengan demikian indikator kinerja ini telah tercapai yang mana telah mecapai dari target yang telah ditentukan pada triwulan I. Berikut Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dengan hasil pada tabel berikut:

Tabel 24. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	Satuan Kerja	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Stasiun PSDKP Pontianak	14	14	100

Perbandingan Pencapaian Indikator Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 25. Perbandingan Target dan Capaian pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
<b>% Capaian</b>	-		-		-		100		100	

## 10. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Indikator kinerja ini merupakan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2023 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 30 September 2024 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Target Indikator Kinerja ini lingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024 sebesar 80%. Sampai 31 Maret didapat capaian sebesar 80% dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak pada perhitungan triwulan I tahun 2024 tidak terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP RI maka capaian sama dengan target yaitu 80% atau persentase capaian sebesar 100%. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah mencapai dari target yang sudah ditentukan yaitu 80%. Indikator kinerja jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 mengalami nilai yang sama yaitu dengan persentase capaian 100%. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022. Tercapainya indikator ini dikarenakan tidak terlepas dari Stasiun PSDKP Pontianak yang secara responsif menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan dalam perbaikan kinerja organisasi dimulai dari pimpinan sampai diturunkan pada pegawai dibawahnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja yang lebih baik serta monitoring dan pendampingan dari tim dari Setditjen PSDKP. Capaian hasil persentase Jumlah rekomendasi Hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 26. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan

Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
Stasiun PSDKP Pontianak	0	0	0	0	0

Sebagai bahan perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 27. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	70	100	75	75	80	80
<b>% Capaian</b>	-		-		142		100		100	

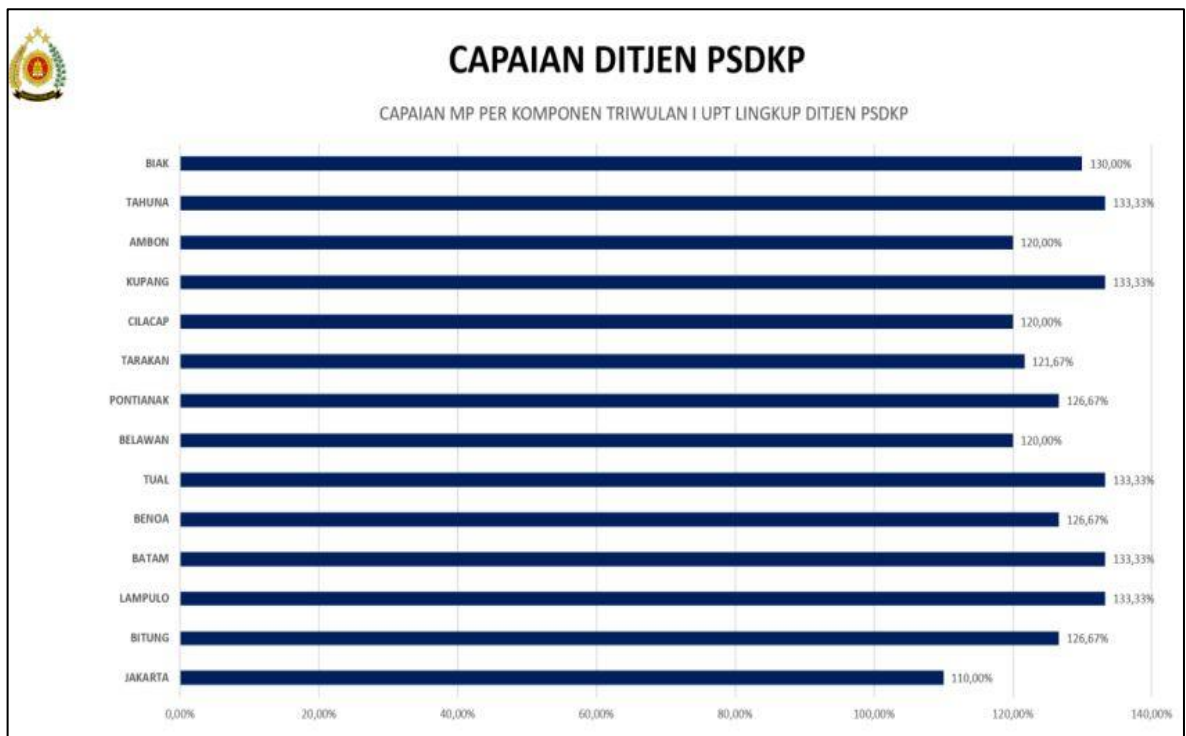
### 11. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi Bitrix24.com dan *Colaboration Office* dengan target 94% pada tahun 2024. Perhitungan capaian Presentase unit kerja Stasiun PSDKP Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada tahun 2024 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian Triwulan I sebesar 126,67% atau persentase 134,75% dengan target 92%, maka indikator kinerja ini tercapai pada Triwulan I tahun 2024 hal ini disebabkan karena semua Ketua Tim Kerja tertib dalam mengunggah kegiatan pada triwulan I Tahun 2024 di *Colaboration Office*. Data dan informasi yang disajikan dalam *Colaboration Office* Stasiun PSDKP Pontianak diantaranya berupa : Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, Profil Stasiun PSDKP Pontianak serta Satuan Pengawas (Satwas) SDKP dan Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Pontianak.

Apabila dibandingkan dengan Capaian pada tahun 2023 pada triwulan yang sama, indikator kinerja ini mengalami peningkatan karena Capaian pada Tahun 2023 triwulan I tercapai sebesar 92% dengan target 92%. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi melebihi dari target yang sudah ditentukan. IKU dapat dibandingkan dengan dokumen Renstra 2020 – 2024.

Target indikator kinerja ini dapat dicapai dan melampaui target yang ditentukan dikarenakan adanya keikutsertaan dan keaktifan pejabat dalam hal ini

Kepala Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan I dengan aplikasi *Colaboration Office* dan keaktifan para Katimja pada Triwulan I pada aplikasi *Colaboration Office* Stasiun PSDKP Pontianak dalam ternilai maksimal karena secara reguler dilakukan evaluasi terhadap postingan bulanan Stasiun PSDKP Pontianak pada aplikasi *Collaboration Office* sebanyak 2 sampai 3 postingan setiap bulannya bagi yang memiliki akun sebagai rincian capaian indikator kinerja ini serta peran Tim dari Setditjen PSDKP dalam memonitoring pelaksanaan ini. Telah mengikuti kegiatan Sosialisasi *Colaboration Office* yang di selenggarakan oleh Pusdatin KKP. Capaian indikator kinerja unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6. Capaian IK unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Sebagai bahan perbandingan Capaian IK unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dalam jangka menengah dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 28. Perbandingan Target dan Capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	65	55,56	84	97,78	86	86,11	92	97,04	94	126,67
<b>% Capaian</b>	85		116		100		105		134,75	

## 12. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Pontianak. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP yaitu Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) dan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan). Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen PSDKP sebagai berikut:

$$X_{ikm} = X_1$$

$X_{ikm}$  : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Pontianak

$x_1$  : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO dan LVHP

Pemenuhan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO dan LVHPI Kapal Perikanan pada Triwulan I Tahun 2024 terealisasi sebesar 92,93 dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 80 atau dengan presentase capaian 116,16%. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 dengan merujuk pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) dan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan). Dimana pada tahun 2024 IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak ini merupakan penggabungan dari kedua IKU Indeks Kepuasan

Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) dan Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan). Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 pada periode yang sama. Indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena ini merupakan Indikator kinerja baru dimulai pada tahun 2024. Indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan dokumen Renstra, karena di Renstra 2020-2024 indeks kepuasan Masyarakat pengguna SLO dan LVHPI itu terpisah dan merupakan indikator kinerja masing-masing. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO dan LVHPI Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yaitu SLO LVHPI Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap Triwulan atau setahun sebanyak 4 kali dengan ini indikator kinerja dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah melampaui target.

Keberhasilan indikator kinerja ini dikarenakan langkah Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan telah memanfaatkan kanal-kanal yang telah ada baik melalui kotak pengaduan yang telah ada di masing-masing kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, mensosialisasikan nomor kontak pengaduan yang bisa dihubungi baik via telepon, sms maupun WhatsApp, yang bisa dimanfaatkan oleh penerima layanan dalam menyampaikan aduan, saran, dan masukan melalui website: [lapor.go.id](http://lapor.go.id) dan [kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak](http://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak). Respon dalam penanganan aduan, saran, dan masukan juga dipercepat dengan telah membentuk tim khusus dalam penanganan aduan, saran, dan masukan pemberian pelatihan/bimbingan teknis kepada petugas pelayanan telah berpengaruh baik dan dirasakan oleh pengguna layanan Hal ini disebabkan oleh petugas pelayanan telah menerapkan Budaya Pelayanan 7S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Sigap dan Syukur) dan menerapkan Motto Pelayanan MANTAP (Mudah, Akuntabel, Nyaman, Transparan, Adil, Profesional pada saat melakukan pelayanan kepada pengguna layanan Pelayanan di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Pelayanan selama ini yang telah berjalan adalah 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan atau nonstop setiap hari sehingga sewaktu-waktu nelayan atau pengusaha membutuhkan SLO dapat dilayani langsung oleh



petugas yang ada di setiap kantor layanan. Hal tersebut termasuk pengejawantahan standar pelayanan yang telah disepakati oleh penyedia layanan (Stasiun PSDKP Pontianak) dengan pemanfaat layanan (Pelaku Usaha) bahwa Standar Pelayanan SLO adalah 90 menit dan LVHPI 75 menit. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur sudah ditetapkan oleh Stasiun PSDKP Pontianak dalam bentuk SOP yang telah disosialisasikan dan ditempel di setiap kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP. Pengguna layanan akan terus diberikan pemahaman bahwa petugas pelayanan publik selama ini dalam menjalankan tugasnya telah menerapkan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur yang sudah ditetapkan di setiap kantor pelayanan telah tersedia sarana dan prasarana yang mendukung sebagai standar minimal kantor layanan seperti kursi, meja, perangkat komputer dan alat tulis kantor penunjang, alat peraga dan papan informasi, ruangan yang nyaman dan toilet yang bersih. Stasiun PSDKP Pontianak akan tetap terus meningkatkan sarana dan prasarana di seluruh wilayah Satwas dan Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

INDEKS KEPUJUAN MASYARAKAT (IKM)											
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK											
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN											
TRIWULAN I TAHUN 2024											
NO.	UNSUR PELAYANAN	PELAYANAN PENERBITAN SLO			PELAYANAN PENERBITAN LVHPI			PELAYANAN PENERBITAN SLO DAN LVHPI			
		RATA-RATA PER UNSUR	INDEKS KONVERSI	MUTU PELAYANAN	RATA-RATA PER UNSUR	INDEKS KONVERSI	MUTU PELAYANAN	RATA-RATA PER UNSUR	INDEKS KONVERSI	MUTU PELAYANAN	
1	Persyaratan	3.884	97.090	A	98.246	98.246	A	3.895	97.383	97.383	
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.803	95.075	A	95.614	95.614	A	3.808	95.212	95.212	
3	Waktu Penyelesaian	3.788	94.701	A	97.588	97.588	A	3.817	95.434	95.434	
4	Biaya/Tarif	3.842	95.045	A	99.561	99.561	A	3.878	96.938	96.938	
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.699	92.313	A	95.833	95.833	A	3.728	93.207	93.207	
6	Kompetensi Pelaksana	3.549	88.731	A	90.132	90.132	A	3.563	89.087	89.087	
7	Perilaku Pelaksana	3.609	90.224	A	91.009	91.009	A	3.617	90.423	90.423	
8	Pemangangan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.582	89.552	A	89.474	89.474	A	3.581	89.532	89.532	
9	Sarana dan Prasarana	3.567	89.179	A	89.035	89.035	A	3.566	89.143	89.143	
<b>RINCIAN</b>											
JUMLAH RESPONDEN		335	Orang		114	Orang		449	Orang		
JENIS KELAMIN		L	330		L	114		L	444		
		P	5		P	0		P	5		
PENDIDIKAN		SD	167		SD	48		SD	215		
		SMP	55		SMP	19		SMP	74		
		SMA	109		SMA	47		SMA	156		
		D3	0		D3	0		D3	0		
		S1	4		S1	0		S1	4		
		S2	0		S2	0		S2	0		
		S3	0		S3	0		S3	0		
PERIODE SURVEY		2 Januari - 30 Maret 2024			10 Januari - 27 Maret 2024			2 Januari - 30 Maret 2024			
NILAI INTERVAL		3.702			3.762			3.717			
<b>NILAI IKM</b>		<b>92.55</b>			<b>94.05</b>			<b>92.93</b>			
<b>MUTU PELAYANAN</b>		<b>A</b>			<b>A</b>			<b>A</b>			
<b>KINERJA UNIT PELAYANAN</b>		<b>SANGAT BAIK</b>			<b>SANGAT BAIK</b>			<b>SANGAT BAIK</b>			
<b>TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT</b>											

Gambar 7. Capaian IKM Pelayanan Publik

Tabel 29. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	-	-	80	92,93
<b>% Capaian</b>	-		-		-		-		116,16	

### 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak dengan Satker UPT Sejenis/Setara

Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun triwulan I tahun 2024 telah membandingkan hasil capaian kinerja baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja dengan Satuan kerja UPT setara/ sejenis. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang di bandingkan sebanyak 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama dan capaian Indikator Kinerja Manajerial dimana terdapat 1 indikator kinerja yang tidak tercapai. Adapun capaian Stasiun PSDKP Pontianak bila dibandingkan dengan hasil capaian kinerja triwulan I tahun 2024 dengan 7 (tujuh) UPT satker setara/ sejenis, sebagai berikut;

#### 1. IKU-1 Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	91	100	109.89
2	Stasiun PSDKP Biak	91	100	109.89
3	Stasiun PSDKP Ambon	91	60	65.93
4	Stasiun PSDKP Tahuna	91	79.47	87.33
5	Stasiun PSDKP Pontianak	91	94.17	103.48
6	Stasiun PSDKP Belawan	91	97.20	106.81
7	Stasiun PSDKP Kupang	91	100	109.89
8	Stasiun PSDKP Tarakan	91	89,89	98.78

#### 2. IKU-3 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	91	94.17	103.48
2	Stasiun PSDKP Biak	91	100	109.89
3	Stasiun PSDKP Ambon	91	94.07	103.37
4	Stasiun PSDKP Tahuna	91	100	109.89
5	Stasiun PSDKP Pontianak	91	84	92.31
6	Stasiun PSDKP Belawan	91	100	109.89
7	Stasiun PSDKP Kupang	91	100	109.89
8	Stasiun PSDKP Tarakan	91	86.66	95.23

3. IKU-3 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengaws

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100

4. IKU-4 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100	
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100	
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100	
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100	
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100	
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100	
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100	

5. IKU-5 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100	
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100	
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100	
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100	
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100	
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	
7	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100	
8	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100	

6. IKU-6 Indeks pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	40	40	100.00	
2	Stasiun PSDKP Biak	40	80	200.00	
3	Stasiun PSDKP Ambon	40	0	0.00	
4	Stasiun PSDKP Tahuna	40	40	100.00	
5	Stasiun PSDKP Pontianak	40	80	200.00	
6	Stasiun PSDKP Belawan	40	80	200.00	
7	Stasiun PSDKP Tarakan	40	100	250.00	
8	Stasiun PSDKP Kupang	40	100	250.00	

7. IKU-7 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	40	80	200.00
2	Stasiun PSDKP Biak	40	80	200.00
3	Stasiun PSDKP Ambon	40	0	0.00
4	Stasiun PSDKP Tahuna	40	0	0.00
5	Stasiun PSDKP Pontianak	40	80	200.00
6	Stasiun PSDKP Belawan	40	0	0.00
7	Stasiun PSDKP Kupang	40	40	100.00
8	Stasiun PSDKP Tarakan	40	81.82	204.55

8. IKU-8 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	40	40	100
2	Stasiun PSDKP Biak	40	40	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	40	0	0
4	Stasiun PSDKP Tahuna	40	40	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	40	40	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	40	0	0
7	Stasiun PSDKP Kupang	40	40	100
8	Stasiun PSDKP Tarakan	40	100	120

9. IKM-9 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Pontianak (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100

10. IKM-20 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	100	120
2	Stasiun PSDKP Biak	80	80	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	80	100
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	80	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	80	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	100	120
7	Stasiun PSDKP Kupang	80	80	100
8	Stasiun PSDKP Tarakan	80	100	120

11. IKM-11 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	94	120	127.66
2	Stasiun PSDKP Biak	94	130	138.30
3	Stasiun PSDKP Ambon	94	120	127.66
4	Stasiun PSDKP Tahuna	94	133.33	141.84
5	Stasiun PSDKP Pontianak	94	126.67	134.76
6	Stasiun PSDKP Belawan	94	120	127.66
7	Stasiun PSDKP Kupang	94	133.33	141.84
8	Stasiun PSDKP Tarakan	94	121.67	129.44

12. IKM-12 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	89.05	111.31
2	Stasiun PSDKP Biak	80	91.87	114.84
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	92.32	115.40
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	91.48	114.35
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	92.93	116.16
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	88.04	110.05
7	Stasiun PSDKP Kupang	80	95.92	119.90
8	Stasiun PSDKP Tarakan	80	91.30	114.13

### 3.4. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak diperoleh dari agregasi 5 mata anggaran kegiatan Tahun 2024, yaitu: <sup>(1)</sup> Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas; <sup>(2)</sup> Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; <sup>(3)</sup> Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan; <sup>(4)</sup> Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan; <sup>(5)</sup> Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP, dengan hasil pengukuran sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 30. Rincian Realisasi Anggaran Triwulan I 2024

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				(Rp)	%
1.	2350	Pemantauan dan Operasi Armada	20,688,335,000	1,333,867,420	6.45
2.	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	849,000,000	59,307,161	6.99
3.	2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	683,000,000	105,708,999	15.48
4.	2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	656,600,000	79,587,618	12.12
5.	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	19,071,535,000	3,884,820,550	20.37
<b>Total</b>			<b>41,948,470,000</b>	<b>5,463,291,748</b>	<b>13.02</b>

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak pada Tahun 2024 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440847/2024 tanggal 24 November Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41,948,470,000,- (Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Atus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Ribu Rupiah). Sepanjang triwulan I tahun 2024 realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sampai 31 Maret Tahun 2024 sebesar 13,02% atau sebesar Rp. 5.463.291.748,- (Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

**4.1 Kesimpulan**

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak triwulan I Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam capaian strategis Stasiun PSDKP Pontianak pada periode triwulan I Tahun 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian indikator kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.
2. Keseluruhan indikator kinerja sebanyak yang dihitung pada triwulan I tahun 2024 sebanyak 12 (dua belas) indikator kinerja dimana 1 indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu indeks kinerja speedboat pengawas.

**4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja Stasiun PSDKP Pontianak pada triwulan I Tahun 2024, maka untuk triwulan dan tahun berikutnya terdapat rekomendasi untuk perbaikan diwaktu yang akan datang, rekomendasi dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 31. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut triwulan I Tahun 2024 Stasiun PSDKP Pontianak

No	Hal yang Harus Menjadi Perhatian	Permasalahan	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Indeks kinerja Speedboat pengawas	Nilai indek tidak tercapai karena 2 speedboat belum melakukan operasi	Peningkatan jumlah hari speedboat yang beroperasi	Agar speedboat melakukan gelar operasi secepat mungkin

## LAMPIRAN. PERJANJIAN KINERJA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Quddus  
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Adin Nurawaluddin  
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA  
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan Pontianak



Abdul Quddus

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	91
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan	5	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan (%)	100
		6	Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	7	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	100
SK5	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	8	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	100
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80
SK7	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Berkualitas	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK8	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	12	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	75
		13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	75
		15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	82
		16	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	84
		17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP	80



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	
		18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	21
		19 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak (Inovasi)	1
		20 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80
		21 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	94
		22 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80
		23 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80
		24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	93,76
		25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	82

**Data Anggaran:**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1.	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	20.688.335.000
2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	849.000.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	683.000.000
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	656.600.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	19.071.535.000
<b>Total Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024</b>		<b>41.948.470.000</b>

Jakarta, Januari 2024

**PIHAK KEDUA**  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan Pontianak



Abdul Quddus